

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pariwisata memiliki arti yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau bersama keluarga dan teman dari suatu tempat menuju tempat lain yang ingin dituju, dilakukan dalam waktu yang singkat dan bisa juga lama, umumnya kegiatan wisata dilakukan setelah melalui perencanaan atau persiapan sebelum aktivitas dilakukan. Kegiatan wisata dilakukan dengan memiliki beberapa tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan reaksi agar menyeimbangkan kehidupan sosial, mengenal lingkungan hidup, mengenal budaya yang baru, mencari ilmu-ilmu yang baru diluar kegiatan yang dilakukan sehari-hari seperti bekerja, sekolah dan lainnya. Orang yang melakukan kegiatan wisata disebut sebagai wisatawan. Wisatawan sendiri terdiri dari dua jenis yaitu wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan dari ke sebuah daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal 6 bulan di tempat tersebut (Soekadijo: 1997).

Turisme ini terdiri dari dua dimensi yakni perjalanan (*travel*) dan menginap (*stay*), yang masing-masingnya memiliki komponen. Dimensi travel komponennya adalah Jarak(Dekat, sedang, dan jauh), Daerah asal (*domestic* dan internasional), Modal transportasi yang digunakan (mobil, kereta api, pesawat terbang, kapal, dan lain-lain). Dimensi *stay* komponennya adalah Durasi (kurang lebih 24 jam disebut darmawisata atau *excursion*) dan lebih dari 24 jam disebut dengan liburan atau *holidays*), Tujuan (pekerjaan, pertemuan, urusan keluarga dan lain lain), Akomodasi (hotel, rumah sewaan, *camping*, *holiday village*, Villa, dan lain lain). Berdasarkan kepada batasan konsep turisme, kemudian dalam kegiatan pengembangan industri pariwisata sebagai

sebuah sub sektor perekonomian, maka pariwisata dikategorikan kepada industri pariwisata. Menurut Vanhove (2005) terdapat beberapa sektor utama yang membentuk industri pariwisata di sebuah negara yakni Sektor daya tarik wisata (*attraction sector*) yang terdiri dari daya tarik alamiah, daya tarik budaya, taman nasional, museum, taman buru dan satwa liar, situs sejarah, perlombaan, dan pertunjukkan. Sektor akomodasi (*accommodation sector*) yang terdiri dari hotel, motel, tempat tidur dan sarapan pagi, *guest house*, apartemen, villa, *condominium*, lokasi perkemahan, pelabuhan, perkampungan wisata (*holidays village*), dan lain-lain. Sektor Transportasi (*transportation sector*) yang terdiri dari pesawat udara, kereta api, rute kapal laut, bus wisata, mobil rental, taksi, dan lain-lain. Sektor usaha perjalan wisata (*travel organizer sector*) yang terdiri dari operator *tour*, agen perjalanan, insentif biro perjalanan, dan lain-lain. Sektor organisasi tujuan wisata (*the destination organization sector*) seperti kantor dinas pariwisata provinsi dan kantor Dinas Pariwisata kabupaten/Kota, dan asosiasi turisme. Daya tarik wisata dapat sangat beragam sifatnya, dan dapat diklasifikasikan atas 3 komponen pokok yaitu: daya tarik pokok alamiah (*primary natural attraction*), daya tarik pokok buatan (*primary man-made attraction*), dan membuat daya tarik untuk tujuan tertentu (*purpose-built attraction*). Daya tarik alamiah meliputi daya tarik iklim, pantai, pemandangan indah (*landscape*), flora dan fauna, air terjun, danau, dan pergunungan, termasuk kedalamnya taman nasional, taman hutan raya, dan taman buru (*wildlife*).

Pariwisata di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, dapat kita lihat sendiri dengan terus bertambahnya jumlah wisatawan setiap tahunnya. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan dampak cukup besar bagi perekonomian negara maupun daerah. Beberapa negara kebanyakan juga sangat mengandalkan pariwisata sebagai kegiatan perekonomian prioritas mereka,

teruntuk negara berkembang seperti Indonesia sangat banyak potensi di wilayah Indonesia yang sangat luas untuk ditonjolkan agar menambah daya tarik wisata semakin besar dengan banyaknya pesona kondisi alam, keanekaragaman budaya, aktifitas masyarakat pribumi serta sejarahnya.

Pada saat ini di Indonesia sedang populer topik Desentralisasi yang diperkenalkan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah. Pemerintah Indonesia sangat serius menghasilkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang No.32 Tahun 2004. Kebijakan otonomi wilayah sudah menempatkan Kab/ Kota bagaikan titik berat otonomi, sudah bawa pergantian dalam penerapan pemerintah di wilayah. Salah satu pergantian itu merupakan pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pengelolaan pemerintah di wilayah. Perihal tersebut bawa angin baru untuk pertumbuhan wilayah di Indonesia. (UU Nomor. 32 Tahun 2004).

Otonomi Daerah mempunyai arti yakni hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingannya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat berharap agar Pemerintah Daerah dapat memenuhi setiap kebutuhan di daerahnya masing-masing. Hal ini akan membuat setiap daerah lebih mandiri dalam pengelolaan di berbagai bidang. (UU No.32 Tahun 2004).

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang dilakukan agar terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi untuk melakukan pembangunan daerah merupakan tugas pokok dari pemerintah daerah tersebut. Untuk mengetahui kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri maka dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerahnya. Diharapkan ini menjadi salah satu komponen andalan penerimaan daerah di era otonomi daerah. (Siagian, 2005:4-5)

Indikator yang paling utama dalam menilai tingkat kemandirian pemerintah daerah dibidang keuangan adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran (APBD) mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintah. (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Undang-undang ini mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis retribusi daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan pasal 108 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang obyek retribusi terdiri dari jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Tujuan utama pemungutan pajak dan retribusi adalah mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin dari pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan pemerintah daerah agar tercapai target yang telah ditetapkan. Dan jika memenuhi target atau tidaknya maka dapat kita lihat tingkat efektifitasnya serta kontribusinya terhadap PAD kota Padang. Selain tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Undang-undang No.28 Tahun 2009, menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan sistem dan pengelolaan umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya sistem dan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi ditetapkan dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009. Prinsip Komersial dipakai dalam pemungutan iuran retribusi .

Menurut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang (2018), setiap tahunnya kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik menuju kota Padang mengalami kenaikan. Kunjungan terbesar wisatawan kota Padang dengan jumlah 4.435.661 orang dalam rincian wisatawan mancanegara sebesar 67.286 orang dan

wisatawan domestik sebesar 4.368.375 orang terjadi pada tahun 2017 yang merupakan kenaikan yang paling signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini Pemerintah Kota Padang sangat gencar dalam memperbaiki sarana dan pra sarana untuk menunjang sektor pariwisata karena sektor pariwisata ini cukup banyak menyumbang untuk Pendapatan Asli Daerah Kota Padang dan juga Pariwisata Kota Padang banyak mengundang para wisatawan untuk berkunjung. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari tahu perkembangan yang terjadi di bidang pariwisata Kota Padang.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dalam pelaksanaan magang tertarik mengangkat judul : “ KONTRIBUSI RETRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PADANG”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai acuan dalam melakukan secara baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah. Agar tujuan penelitian dapat terarah maka akan dibatasi pada objek-objek permasalahan yang diteliti pada Dinas Pariwisata Kota Padang sebagai berikut :

1. Berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang?
2. Destinasi pariwisata mana yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang?
3. Apakah pendapatan dari sektor pariwisata sudah efektif terhadap PAD Kota Padang?

1.3. TUJUAN MAGANG

Magang adalah kegiatan wajib bagi mahasiswa/mahasiswi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas karena bagian dari mata kuliah, Adapun tujuan magang sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
2. Untuk mengetahui destinasi pariwisata mana yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.
3. Untuk mengetahui efektivitas pendapatan dari sektor pariwisata terhadap PAD Kota Padang.

1.4. MANFAAT MAGANG

Magang adalah sebuah kegiatan menguntungkan yang diberikan kepada mahasiswa/mahasiswi untuk memiliki pengalaman bekerja. Magang biasanya dilakukan di instansi pemerintah terkait dengan waktu sekitar 3 bulan atau biasanya 40 hari kerja. Magang dilakukan untuk mempelajari proses dan praktek-praktek pekerjaan secara langsung, sehingga dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa magang sendiri. Adapun manfaat magang yang dicapai yaitu :

Manfaat bagi penulis :

1. Untuk mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja.
2. Menambah ilmu dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.
3. Membentuk kepribadian yang bertanggung jawab, mandiri, terlatih, disiplin, dan tangguh yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja.

4. Terlatih menyesuaikan diri dalam ruang lingkup yang luas dan berhadapan dengan berbagai macam karakter dalam kepribadian serta kedisiplinan ilmu yang berbeda.
5. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam pembahasan teori dan aplikasi yang diperoleh dari Keuangan Negara dan Daerah.

Manfaat bagi tempat magang :

1. Terjalannya kerjasama antara dunia pendidikan dengan instansi pemerintah sehingga dikenal oleh kalangan akademis.
2. Instansi pemerintah mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa yang melakukan praktek magang.

Manfaat bagi Universitas :

1. Terjalannya kerjasama antara Universitas Andalas dengan Instansi Pemerintahan.
2. Universitas Andalas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui kegiatan magang.
3. Universitas Andalas akan lebih dikenal di dunia Instansi Pemerintahan.

1.5. METODE PENGUMPULAN DATA

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
2. Melakukan penelitian melalui observasi dan pengamatan secara langsung di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang.
3. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
4. Melakukan penelitian melalui pengumpulan bahan dari buku dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas.

5. Pengumpulan data melalui internet
6. Melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan dari internet atau website-website yang terkait dengan permasalahan.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan magang ini dibagi atas lima bab yang mana masing-masing bab mempunyai sub-sub bab yang menjadi suatu kesatuan kerangka karangan pemahaman masalah dan masing-masing bab berhubungan satu sama lain. Sistematika laporan magang ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, metode pengambilan data dan sistematika penulisan.

BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dalam studi dan pembahasan tentang, Pendapatan Asli Daerah dan berapa kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah serta destinasi pariwisata yang ada di Kota Padang.

BAB III: Gambaran Umum

Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum instansi pemerintahan yang terdiri dari sejarah umum, visi dan misi instansi , struktur organisasi instansi dan aktifitas yang dilakukan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Padang.

BAB IV : Pembahasan

Bab ini merupakan bagian inti dari penulisan yang memuat data dan informasi mengenai kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

BAB V : Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk dipertimbangkan dalam rangka peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

